

## Jokowi - Ma'ruf Amin: Politik Identitas VS Isu Ekonomi

Reporter: [Tempo.co](http://Tempo.co)

Editor: [Syailendra Persada](#)

Senin, 20 Agustus 2018 13:03 WIB



*Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin memberikan keterangan pers tentang menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai NKRI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017. Jokowi secara resmi mendeklarasikan Maruf sebagai calon wakil presiden pendampingnya di Jakarta, Kamis malam, 9 Agustus 2018. TEMPO/Subekti*

TEMPO.CO, Jakarta - Politik identitas rupanya masih menjadi momok bagi kubu Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau [Jokowi](#). Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira mengatakan dengan memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Jokowi menjawab persoalan politik identitas.

Baca: [Kekuatan dan Kelemahan Cawapres Maruf Amin Kata Voxpol Center](#)

"Banyak variabel berubah ketika menentukan siapa cawapres. Salah satunya politik identitas," kata Andreas di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Andreas mengatakan Ma'ruf Amin bisa meredam politik identitas yang selama ini dialamatkan kepada Jokowi. "Untuk sementara saya bilang selamat tinggal politik identitas."

Jokowi memang kerap diserang dengan isu yang berkaitan dengan politik identitas. Dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014, misalnya, ada kelompok orang yang menyebarkan isu bahwa Jokowi nonmuslim. Selain itu, ada juga kabar burung yang menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Simak juga: [Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma'ruf Amin](#)

Dalam kurun waktu empat tahun pemerintahannya, alih-alih dikritik soal program kerja, ada segelintir orang yang menyerang Jokowi dengan isu berbau rasial. Misalnya, di awal tahun lalu, Jokowi disebut terlalu dekat dengan Cina sehingga meloloskan banyak pekerja asing dari sana.

Bagaimana pemilih mempertimbangkan sara untuk menentukan pilihan mereka? Baca kelanjutannya...

Lembaga Indo Survey dan Strategy (ISS) pernah menggelar sigi di Jawa Barat pada November 2017, di Banten pada Agustus 2017, kemudian di Nusa Tenggara Barat pada September 2017. Survei dengan metode acak berjenjang (multiple random sampling) ini dilakukan untuk mengukur kecenderungan pemilih terhadap isu sara.

Hasilnya, "Pemilih Indonesia cenderung menentukan pilihannya berdasarkan kesamaan, baik agama, suku, maupun rasnya," kata Direktur ISS Kayono Wibowo, Selasa, 13 Maret 2018. "Isu SARA dan komunis memang menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan."

Simak: [Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei...](#)

Sebanyak 85,3 persen responden di Jawa Barat menyatakan kesamaan agama sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Yang tidak terpengaruh sebanyak 12,8 persen responden dan 2,0 persen menjawab tidak tahu.

Sedangkan untuk isu komunis 86,8 persen responden tidak akan memilih pasangan yang menganut paham komunis, 5,1 persen akan mempertimbangkan, dan 0,8 persen tidak menentukan pilihan. "Karakter pemilih Indonesia itu ada kecenderungan kuat terhadap politik identitas," kata Kayono.

Sebanyak 62,33 persen responden di NTB tidak akan memilih pasangan calon yang menganut paham komunis, 0,17 pasti akan memilih, 3 persen akan mempertimbangkan, 34,5 tidak tahu. Untuk isu agama, 90 persen menghendaki adanya kesamaan keyakinan, 8,5 persen tidak tahu, dan 2 persen tidak terpengaruh.

Simak juga: [Buya Syafii Tepis Isu Jokowi Kafir](#)

Survei di empat kota/kabupaten di Banten juga menunjukkan responden cenderung tidak mau memilih jika pasangan calon dalam pemilu menganut paham komunis. Mereka yang menolak berkisar 59-71 persen responden di empat wilayah itu. "Begitu juga dengan isu agama, seperti paham Syiah," kata Kayono.

Namun, dengan memilih Ma'ruf Amin, Andreas membaca saat ini kritik terhadap Jokowi sudah mulai bergeser ke isu-isu ekonomi. "Kubu lawan sudah mulai menyerang dengan menyinggung soal janji-janji Jokowi yang belum terpenuhi," kata Andreas.

Menurut Andreas, langkah tersebut justru lebih sehat ketimbang menggunakan politik identitas. Posisi koalisi Jokowi, kata dia, adalah defensif (bertahan) dalam menjawab kritik kubu Prabowo Subianto. Jika kritik itu bisa dijawab dengan baik, jawaban tersebut bisa menjadi serangan balik yang baik terhadap Prabowo.

Baca juga: [Antisipasi Ditinggal Pemilih, Jokowi - Ma'ruf Lakukan Cara Ini](#)

Andreas melihat pilihan Jokowi terhadap Ma'ruf Amin sudah tepat. Jokowi, kata dia, tidak memiliki beban menghadapi persoalan agama dan politik identitas. Pasalnya, kehadiran Ma'ruf dapat menjawab pertanyaan tersebut yang berkembang di kelompok tradisional kultural.

Kubu Gerindra berpendapat politik identitas justru mencuat setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kenapa?

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan politik identitas di Indonesia dimulai dari pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Ahok menggantikan Joko Widodo yang maju dalam pemilihan presiden 2014.

Baca: [Gerindra: Ahok Kader Salah Asuhan](#)

Ferry menjelaskan, Gerindra merupakan partai pendukung Jokowi di pilkada DKI 2012. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lah yang mengusulkan nama Ahok sebagai calon wakil gubernur. Saat itu, kata Ferry, Gerindra ingin melakukan eksperimen politik. Dalam perkembangan politik selanjutnya, Jokowi mengikut pilpres 2014 dan terpilih.

"Pak Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI. Pada saat jadi pelaksana tugas Gubernur DKI itu lah menurut saya asal muasalnya ada politik identitas," kata Ferry di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Terlepas dari sejumlah prestasi Ahok, Ferry mengungkapkan ada sejumlah masalah tentang pengusuran masyarakat dan direspons dengan unjuk rasa. Bersamaan dengan itu, juga ada masalah reklamasi yang dianggap mengabaikan regulasi. Masyarakat juga khawatir pembangunan di reklamasi hanya diperuntukkan bagi golongan kelompok sosial tertentu.

Puncaknya, kata Ferry, Ahok sebagai kepala daerah memasuki ranah agama orang lain. "Dengan lepas pro kontra tapi penggunaan surat Al Maidah, masuk ranah agama orang lain. Di situ isu primordial muncul dan menimbulkan gelombang protes baik 411, 212, dan secara keseluruhan," ujarnya.

Dalam perkembangannya, Ferry menuturkan bahwa sejumlah kasus yang dialami Ahok akhirnya membentuk kesadaran pemilih pada pilkada DKI 2017, dengan memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Simak juga: [Lawan Ahok di Pilkada, Gerindra: Bagian dari Pertobatan](#)

Adapun di pilpres 2019, Ferry mengatakan bahwa Gerindra dan koalisi sepakat untuk tidak terjebak dalam kesempitan cara berpikir politik identitas. Buktinya, kata dia, meski hasil ijtima GNPF Ulama yang merekomendasikan nama Ustad Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Prabowo Subianto akhirnya memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Kubu Prabowo juga menuding justru Jokowi yang mengkotak-kotakan masyarakat. Baca kelanjutannya...

Sementara itu, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya tidak pernah membenci Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia juga menyatakan tidak pernah memainkan isu berbau sara untuk mengkritik Jokowi. "Pak Prabowo bahkan berkali-kali memberikan motivasi kepada Pak Jokowi," kata dia.

Baca: [Gerindra: Kami Tak Pernah Membenci Jokowi](#)

Menurut Andre, dari dulu Gerindra hanya fokus mengkritik Jokowi dari isu ekonomi. Alasannya, Gerindra melihat banyak persoalan belum selesai di bidang ekonomi. Misalnya, soal lapangan pekerjaan dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.

Makanya, kata Andre, Prabowo akan fokus pada ekonomi kerakyatan seperti yang selama ini kerap disampaikan. "Intinya ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi neolib," kata Andre.

Baca juga: [Visi Misi Prabowo: Dari Utang Negara hingga Ketimpangan Ekonomi](#)

Prabowo, kata dia, ingin mengedepankan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu juga disebut menaruh perhatian pada utang negara, tenaga kerja asing, dan ketimpangan ekonomi.

Andre mengatakan polarisasi yang kini terjadi pada masyarakat adalah akibat dari kepemimpinan Jokowi. Ia membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan sepuluh tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ia nilai tenteram dan damai dalam balutan kebhinnekaan.

"Setelah pak Jokowi dengan baju kotak-kotaknya memimpin Republik Indonesia ini, mulai lah Indonesia dalam pengkotak-kotakkan," ucap Andre.

Ia kemudian menyinggung pernyataan Jokowi dalam acara relawan Pro Jokowi (Projo) di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 4 Agustus 2018 yang dia anggap provokatif.

Dalam acara rapat umum relawan di Bogor itu, Jokowi meminta pendukungnya tidak memulai permusuhan, mencela, memfitnah, dan menjelekkan orang lain. "Tapi, kalau diajak berantem juga berani," kata Jokowi.

Baca juga: [Lawan Politik Gunakan Isu Ekonomi, PDIP: Malah Bagus!](#)

"Tapi pak [Jokowi](#) membangun narasi kebencian dengan mendorong agar tidak takut berkelahi. Ini kan diindikasikan pak Jokowi mendorong ada undangan kekerasan dalam pemilu 2019 nanti," kata Andre.

FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | TAUFIQ SIDDIQ | RYAN DWIKY |  
IMAM HAMDI